

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik *monitoring* kinerja (Samani, 2008).

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003).

Kajian mengenai *corporate governance* meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance* (Cornett dkk, 2006). Beberapa kasus yang terjadi

di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *corporate governance*. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo, 2004). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

*Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan komite audit) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan

laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya.

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *Corporate Governance* dan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

Ada beberapa peraturan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* baik yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia, Nomor 8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga sudah mensyaratkan keberadaan komisaris

independent dan komite audit bagi semua perusahaan publik. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/2002 sudah mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Rujukan-rujukan tentang praktik-praktik terbaik sudah tersedia luas. Misalnya, melalui FCGI untuk rujukan praktik terbaik penerapan manajemen risiko dan komite audit serta melalui *Indonesian Society of Independent Commissioners (ISICOM)* untuk praktik terbaik fungsi dan peran komisaris independen.

*Pilot Project Self Assessment* merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat *GCG* perbankan di Indonesia. Proyek ini September 2007 dilakukan terhadap 130 bank termasuk kantor cabang bank asing. Penilaian dilakukan pada 13 aspek. Dari 130 bank yang ditelaah, 12 bank memperoleh kategori sangat baik, 76 bank baik, 39 bank cukup baik, dan 3 bank kurang baik. Lebih lanjut, hasil evaluasi BI menyebutkan, 53,5 persen bank di Indonesia belum memiliki Komisaris Independen, 30,7 persen bank belum membentuk komite secara lengkap, dan 18,8 persen bank belum memiliki jumlah komisaris yang lebih besar dari jumlah direksi. Dari penelitian Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa *GCG* masih sebatas peraturan belum menjadi budaya organisasi, 69,3 persen bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan *good corporate governance (GCG)* (Ghufron, 2008).

Sehubungan dengan itu dibutuhkan ketegasan pihak-pihak yang terkait. Contoh, baru-baru ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) memberikan sanksi kepada tiga perusahaan yang terdaftar di Bursa. Salah satu

diantaranya terbukti melaksanakan transaksi pinjaman senilai Rp. 10 milyar kepada 64% pemegang sahamnya tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya. Hal ini dianggap melanggar ketentuan BAPEPAM mengenai benturan kepentingan. Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha spesifik (*nature of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O'Hara, 2003). Sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *corporate governance*, terlebih lagi setelah beberapa negara Asia terkena krisis *financial* (Supriyanto, 2006). Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam penerapan *corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001). *Corporate governance* pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan Levine, 1993). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Supriyatno, 2006).

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak-transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme *corporate governance*. Masalah keagenan dalam sektor keuangan-perbankan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat utang (*debt agency problem*) dan kedua masalah keagenan akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*).

Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998). Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd *et al.* (1998) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba

menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran *monitoring* oleh dewan komisaris (*board of directors*). Dechow *et al.* (1996) dan Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Nama besar, kemauan dan itikad baik saja belum cukup untuk membangun dewan komisaris berkelas dunia, dibutuhkan struktur, sistem dan proses yang memadai. Dewan komisaris harus berperan aktif, independen dan konstruktif (Alijoyo, A, 2004).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 1995), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004).

*Cash flow return on assets (CFROA)* merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. *CFROA* lebih memfokuskan

pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan *CFROA* tidak terikat dengan harga saham (Cornett *et al*, 2006). Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkelanjutan (*sustainable*) di sektor korporat. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003).

*Leverage* perusahaan juga berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi dapat dipandang dari dua sisi. Sisi positif menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengembangkan kegiatan usahanya. Sisi negatif menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berusaha untuk menutupi kekurangan dana operasional yang dimilikinya atau sedang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini menyebabkan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut menjadi berbeda.



Berdasarkan uraian di atas menarik diteliti pengaruh dari *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu penelitian dengan judul "PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN "PERBANKAN" DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007-2010"

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah direksi berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah jumlah komisaris berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah jumlah dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh jumlah direksi terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh jumlah komisaris terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh jumlah dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan *leverage* terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada:

- a. Para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memprediksi kinerja perusahaan, sehingga dapat mengantisipasi investasi yang salah.

- b. Bagi manajemen perusahaan, dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan dan memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi keuangan mengenai kinerja yang dialami perusahaan. Hasil penelitian ini mungkin juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian sejenis dan penelitian lanjutan.

## E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini.

BAB III Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran, metode penelitian yang menguraikan tentang pemilihan desain penelitian, pemilihan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, serta pemilihan setting penelitian.

BAB IV Analisis data dan pembahasan yang akan membahas dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan *corporate governance* dan *leverage*.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini yang menjawab pertanyaan penelitian serta keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.